

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- AR, Mustapadidjaja. *BAPPENAS Dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia 1945-2025*. Jakarta: LP3ES.
- Arifin, Tahir. 2015. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta: Index.
- Dwiyanto, Agus. 2014. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- J. Moleong, Lexy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Krina. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas*. Jakarta: Ekretariat good public governance Badan perencanaan pembangunan nasional
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017 *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk kesejahteraan rakyat*. (diakses pada tanggal 10 Maret 2018 (<https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>)).
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Press.
- Rosidin, Utang. 2010. *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sedermayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Bandar Maju
- Sedermayanti. 2004. *Good Governance Membangun Sistem Manajemen Kerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good governance*. Bandung: Bandar Maju.
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siagian, P, Sondang. 2007. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Transfer Kedaerah Dan Dana Desa Sebagai Mana Diubah Dengan PMK Nomor 112/PMK.07/2017.

Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Jurnal:

Amirruddin, muhammadiah, Ruskin Azikin, 2012, *Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur*, Jurnal unismuh, Spektrum 2 (1): 17-31. diakses pada journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/download/34/, tanggal 27 Maret 2018.

Budiyono, 2013, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintahan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance*, Jurnal Ilmu Hukum, Spektrum 7 (1): 5, diakses pada journal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/368/327, tanggal 7 September 2017 pukul 09.00 WIB

Barrington Moore dalam "Instrumen Penilaian Mandiri Dalam Pelayanan Publik Di Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta", Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada ; Centre for Policy Studies, Partnership for Governance Reform, 2008 (<http://kumoro.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2008/02/instrumen-untuk-pelayanan-publik-diy.pdf>)

Iqsan, 2016, *Transparansi Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBIDES) Di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur*, Ejournal ilmu pemerintahn, Spektrum 4 (1): 230-240. diakses pada ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id, tanggal 27 Maret 2018 pukul 19.00 WIB.

Kristiansen, S., Dwiyanto, A., Pramusinto, A., and Putranto, E. A. 2008. *Public Sector Reforms and Financial Transparency: Experiences from Indonesian Districts. Contemporary Southeast Asia* Vol. 31, No.1, pp. 64–87.

Prianto Tiar Pandeiro, Novie Pioh, Josef Kairupan, "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Di Kecamatan

Lalok Kabupaten Bolaang Mongondow”, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol.1 No.1, Tahun 2018, hlm.4.

Seftian Lukow, 2013, *Eksistensi Good governance Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Kota Manado*, Jurnal Portal Garuda, Spektrum 1 (2): 133, diakses pada http://repo.unsrat.ac.id/358/1/Esistensi__Good_Governance_Dalam_Sistem_Pemerintahn_Daerah_Di_Kota_Manado.pdf, tanggal 10 September 2017 pukul 22.00 WIB.

Internet:

Berita TribunNews.Com pada Bulan Agustus 2017, terkait ICW Temukan 110 Kasus Korupsi Anggaran Desa Periode 2016-2017 (diakses pada <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/08/11/icw-temukan-110-kasus-korupsi-anggaran-desa-periode-2016-2017>.

Berita Replika.Co.Id Pada Bulan Oktober 2017, terkait Presiden Akui Ada 900 Kades Tersangkut Kasus Dana Desa (diakses pada <http://www.replika.co.id/nasional/2017/10/18/presiden-akui-ada-900-kades-tersangkut-kasus-dana-desa>.

Berita Sumbar Satu.Com pada Bulan Desember 2017, terkait Nagari Tigo Balai Terbaik I Pengelolaan Dana Desa di Agam (diakses pada <http://www.sumbarsatu.com/berita/17342-nagari-tigo-balai-terbaik-i-pengelolaan-dana-desa-di-agam>.

Berita Antaranews.Com pada Bulan Desember 2017, terkait HPN 2018 - Tim Provinsi Nilai Pengelolaan Dana Desa Nagari Tigo Balai Agam (diakses pada https://sumbar.antaranews.com/berita/199741/16-nagari-di-agam-ajukan-pencairanadn.html?fb_comment_id=1274075679307242_1274084059306404#f18d2421675d0f

